

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DALAM MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
(STUDI KASUS PUSAT KULINER TUGU BUNDARAN KERIS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang
Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**ADRIAN MAULANA RAMADHAN
177310495**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Adrian Maulana Ramadhan
NPM : 177310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru
Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (COVID-19) (Studi Kasus Pusat
Kuliner Tugu Bundaran Keris)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Turut menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dosen Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M. Si

Sylvina Rusadi, S.Sos, M. Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Adrian Maulana Ramadhan
NPM : 177310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru
Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
(Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris)

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Ketua,

Sekretaris,

Sylvina Rusadi, S.Sos, M. Si

Dra. Hj. Monalisa, M. Si
Anggota,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adrian Maulana Ramadhan
NPM : 177310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Implementasi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Sylvina Rusadi, S. Sos, M. Si

Dra. Hj. Monalisa, M. Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucakan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat serta karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Tugu Bundaran Keris)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatul haq dijagar raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini banyak pihak yang dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.M., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibuk Sylvina Rusadi., S. Sos., M.Si selaku dosen pembimbing atas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk dari diri penulis.
6. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada Ayahanda Syamsul Kamal dan Ibunda Citra Swissa, beserta seluruh keluarga besar, atas segala dukungan dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya bagi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Onen Squad, Tupay Squad, dan Kartel yang telah banyak memberi support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan yakinlah untuk sukses dimasa depan dan yakin pada diri sendiri besok mungkin kita sampai. Amiin Ya Robbal'alamin.

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dan Rahmat dari Allah SWT. Demikianlah semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Penulis

Ttd

Adrian Maulana Ramadhan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Pemerintahan	16
2. Konsep Ilmu Pemerintahan	19
3. Konsep Pemerintah Daerah	20
4. Konsep Kebijakan Publik	22
5. Konsep Implementasi	23
6. Konsep Implementasi Pemerintahan	29
7. Konsep Virus Corona (Covid-19)	31
B. Penelitian Terdahulu	32

C. Kerangka Pikiran	34
D. Konsep Operasional.....	35
E. Operasional Variabel	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Key Informan dan Informan	41
D. Teknik Penarikan Informan	42
E. Jenis dan Sumber Data	42
1. Data primer	42
2. Data Sekunder	43
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisa Data	44
H. Jadwal Waktu Kegiatan	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	46
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	46
2. Keadaan Geografis	47
3. Kependudukan.....	48
4. Pemerintahan	49
5. Perekonomian	50
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Identitas Informan	54

1. Jenis kelamin informan	54
2. Tingkat Pendidikan Informan.....	55
3. Umur Informan.....	56
B. Hasil dan Pembahasan	57
1. Komunikasi	58
2. Sumber Daya	61
3. Disposisi	64
4. Struktur Birokrasi	66
C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris).....	68
BAB VI PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	73
GAMBAR LOKASI PENELITIAN:.....	76
DOKUMENTASI WAWANCARA:	79

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Sebaran masyarakat terjangkit Virus Corona (Covid-19) per-Februari 2021 di Kota Pekanbaru.....	6
Tabel I.2	Data Café / Rumah Makan yang melanggar prtokol kesehatan.....	11
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Tentang Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris)....	32
Tabel III.1	Daftar Nama Key Informan dan Informan	42
Tabel III.2:	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	45
Tabel V.1	Tabel Jenis Kelamin Informan Penelitian	54
Tabel V.2	Tabel Tingkat Pendidikan Informan Penelitan.....	55
Tabel V.3	Tabel Tingkat Usia Informan	56

DAFTAR GAMBAR

II.1	Kerangka Pikiran Tentang Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Tugu Bundaran Keris).....	35
	DI KANTOR SATPOL PP KOTA PEKANBARU	76
	DI PUSAT KULINER TUGU BUNDARAN KERIS	78
	Dokumentasi wawancara peneliti bersama Kabid Penegakan Perundang Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru.....	79
	Dokumentasi wawancara peneliti bersama pedagang di Tugu Bundaran Keris	79
	Dokumentasi wawancara peneliti bersama pengunjung di Tugu Bundaran Keris	80



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adrian Maulana Ramadhan

NPM : 177310495

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul UP : Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Adrian Maulana Ramadhan

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DALAM MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
(STUDI KASUS PUSAT KULINER TUGU BUNDARAN KERIS)**

ABSTRAK

Adrian Maulana Ramadhan

177310495

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris). Pencegahan penyebaran Virus Corona upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi tinggi nya angka terpaparnya Virus Corona. Pencegahan penyebaran Virus Corona dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, serta dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek yang terdapat dalam penelitian ini yaitu satu key informan dan empat informan. Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris) dilihat dari empat indikator menurut George C. Edward, yaitu komunikasi pelaksanaan peraturan ini belum berjalan optimal, dilihat dari segi sosialisasi, sedangkan sumber daya sudah berjalan optimal, untuk indikator disposisi belum optimal, dan pada indikator struktur birokrasi sudah optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Virus Corona.

**PEKANBARU CITY GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION
IN PREVENTING THE SPREAD OF CORONA VIRUS (COVID-19)
(CASE STUDY OF THE CULINARY CENTER OF THE TUGU ROUND OF
KERIS)**

ABSTRACT

Adrian Maulana Ramadhan

177310495

This study aims to describe the implementation of the Pekanbaru City Government's Policy in Preventing the Spread of the Corona Virus (Covid-19) (Case Study of the Keris Round about Monument Culinary Center). Prevention of the spread of the Corona Virus is an effort made by the government to reduce the high number of exposure to the Corona Virus. Prevention of the spread of the Corona Virus is carried out based on Pekanbaru Mayor Regulation Number 104 of 2020 concerning Guidelines for New Life Behavior for Productive and Safe Communities in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Pekanbaru City. The method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis techniques, as well as data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation techniques. The subjects in this study are one key informant and four informants. From the results of the research on the Implementation of Pekanbaru City Government Policies in Preventing the Spread of the Corona Virus (Covid-19) (Case Study of the Keris Roundabout Monument Culinary Center) seen from four indicators according to George C. Edward, namely the communication of the implementation of this regulation has not run optimally, in terms of socialization, while the resources have been running optimally, the disposition indicators are not optimal, and the bureaucratic structure indicators are optimal.

Keywords: Implementation, Policy, Corona Virus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum untuk mencapai tujuan tersebut bangsa Indonesia senantiasa melakukan pembangunan yang bersifat fisik, materi, dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang Agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan meningkatkan peran serta dalam masyarakat dalam pembangunan nasional.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), menurut asasi otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini pemerintah daerah diatur dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disahkan presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 september 2014.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintah Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Pemerintah Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum, Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk Urusan Konkuren atau urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi ataupun kabupaten/kota. dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kriteria Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya alam dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan bidang energy dan sumber daya alam yang berkaitan dengan pengelolaan minyak gas dan bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Urusan pemerintahan bidang energi dan Sumber daya alam yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Salah satu bentuk Urusan pemerintahan wajib adalah menangani dan mencegah penyebaran Virus Corona (covid-19). Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.9 Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Telah terbukti menginfeksi saluran cerna berdasarkan hasil biopsi pada sel epitel gaster, duodenum, dan rektum. Virus dapat terdeteksi di feses, bahkan ada 23% pasien yang dilaporkan virusnya tetap terdeteksi dalam feses walaupun sudah tak terdeteksi pada sampel

saluran napas. Kedua fakta ini menguatkan dugaan kemungkinan transmisi secara fekal-oral. Dan Studi lain di Singapura menemukan pencemaran lingkungan yang ekstensif pada kamar dan toilet pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Virus dapat dideteksi di gagang pintu,udukan toilet, tombol lampu, jendela, lemari, hingga kipas ventilasi, namun tidak pada sampel udara (Susilo dalam Rumende,2020)

Peran anggota masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk melawan covid 19, memutuskan mata rantai penyebaran Virus Corona dengan melakukan sosial distancing (menjaga jarak), lockdown, karantina wilayah, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Hal yang paling sederhana dan paling efektif menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid -19 adalah untuk tidak keluar untuk tetap di rumah saja, dan menjaga jarak, jika berada di tempat umum atau keramaian, menggunakan masker serta sering untuk mencuci tangan dan cukup istirahat agar kekebalan tubuh tetap terjaga dengan baik (Kirana,dkk, 2020).

Orang yang kekebalan tubuhnya bagus tidak akan terkena Covid-19, tetapi walaupun tidak terkena Covid-19 namun berpotensi sebagai penular. Oleh sebab itu masing-masing warga hendaknya menjaga diri untuk tidak terkena Covid-19, dengan meningkatkan kedisiplinan, patuh, taat terhadap peraturan dan himbauan yang telah ditetapkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pencegahan wabah Covid-19 adalah tugas kita bersama pemerintah (pusat dan daerah), tiap anggota masyarakat, organisasi masyarakat, pihak swasta dan aparat penegak hukum.

Pemerintah sebagai unsur pelayanan publik memberikan pelayanan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melawan virus Corona antara lain membentuk peraturan, meningkatkan ruang layanan masyarakat, menyiapkan fasilitas sarana penampungan korban virus corona, menggelontor dana untuk kepentingan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak virus corona, memberikan bantuan alat-alat kesehatan yang merupakan alat pelindung diri (APD), baju astronaut, masker bagi tenaga medis yang berstandar kesehatan. (Hartati,2020)

Dari Kota Pekanbaru informasi yang peneliti terima di berita atau internet terdapat kasus pasien yang terkena positif oleh virus corona (covid-19) ini adalah 14.387 orang pada tanggal 20 Februari 2021. (Riauonline.go.id, 2021)

Melihat data yang sudah dari berita atau internet angka yang terkena virus corona cukup bisa dikatakan sebagai angka yang minim dari kota-kota lain yang ada di Indonesia. dinas kesehatan selalu berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona dengan cara selalu bersosialisasi kepada masyarakat agar terus meningkatkan kepedulian nya terhadap kesehan tubuh dan memakai alat pelindung seperti masker dan lain-lain. Dibawah adalah data tabel yang peneliti terima di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Tabel I.1 Data Sebaran masyarakat terjangkit Virus Corona (Covid-19) per-Februari 2021 di Kota Pekanbaru.

NO.	Kecamatan	Jumlah Perkecamatan
1	Bukit Raya	2295
2	Marpoyan Damai	1967
3	Tuah Madani	1440
4	Payung Sekaki	1257
5	Tenayan Raya	1255
6	Bina Widya	1225
7	Rumbai	967
8	Sukajadi	801
9	Limapuluh	555
10	Sail	433
11	Senapelan	412
12	Kulim	401
13	Pekanbaru Kota	351
14	Rumbai Timur	332
15	Rumbai Barat	93
	Jumlah yang positif corona	14.387

Sumber: Data online (Riauonline.go.id, 2021)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sebaran masyarakat yang terjangkit Virus Corona (Covid-19) di Kota Pekanbaru terbanyak berada pada Kecamatan Bukit Raya dan yang paling sedikit pada wilayah Kecamatan Rumbai Barat.

Kasus Virus Corona (Covid-19) yang terus meningkat maka peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menekan kasus penyebaran Virus Corona (Covid-19) ini. Dari sini kita sadari bersama kunci kesehatan keluarga ialah bentuk terkecil dari masyarakat. Setiap anggota keluarga

bersama-sama dengan pemerintah untuk mendukung berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan mengenai pencegahan Virus Corona (Covid-19).

Dari kebijakan adanya peraturan yang harus wajib masyarakat lakukan dan dilaksanakan ialah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru. Pasal 12 yakni;

Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman pada pusat keramaian (bisnis, pasar, mal, restoran, hotel, bioskop, permainan ketangkasan, museum, karaoke, warnet, diskotik, dan jenis bidang kepariwisataan lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g, meliputi:

- a. Semua fasilitas keramaian dan bisnis lainnya wajib untuk menyerahkan “Rencana Pengelolaan Perilaku Hidup Baru” kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan yaitu DPMTSP Kota Pekanbaru. Perangkat Daerah tersebut akan menerbitkan Izin Tatanan Perilaku Hidup Baru dengan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan / protokol kesehatan yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.
- b. Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jaga jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing) pada setiap gerai, toko, anrian, dan semua fasilitas lainnya minimal satu meter lebih disarankan sejauh dua meter antara individu.
- c. Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua area tertutup dan semi tertutup, termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.

- d. Pertokoan, pusat bisnis, bank, perkantoran, pergudangan, bisnis, pas, mal, hotel, bioskop, permainan ketangkasan, museum, karaoke, warnet, diskotik, dan jenis bidang kepariwisataan lainnya:
 1. Menetapkan jumlah maksimum pengunjung 50% dari kapasitas tempat tersedia dalam kurun waktu tertentu.
 2. Membatasi titik masuk/keluar khusus.
 3. Memprioritaskan transaksi online.
 4. Menerapkan layanan penjualan dan atau tanpa kontak orang/ barang dengan pengawasan layanan belanja pelanggan uang non tunai.
 5. Melakukan/ mendisinfeksi terhadap barang-barang yang sering kontak dengan pelanggan/pembeli.
 6. Sering mencuci tangan dan membersihkan peralatan.
 7. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
 8. Lakukan disinfeksi secara rutin.
 9. Menerapkan protokol kesehatan.
- e. Menerapkan metode pembayaran non tunai.
- f. Pengelola harus membatasi jumlah orang yang masuk lift maksimal 50% dari kapasitas.
- g. Restoran café, warung makan, rumah makan dan yang sejenis:
 1. Memprioritaskan layanan take-away/ layanan bawa pulang dan apabila pelayanan makan ditempat, harus dilakukan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh, karyawan dan pengunjung menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter dan penyediaan hand sanitizer.
 2. Pengelola dan karyawan harus dilengkapi dengan face mask/ face shield (pelindung wajah) dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengelola dan menyajikan makanan.

3. Menyediakan daftar menu sekali pakai (tidak dibagi dan dipakai lagi).
4. Menyediakan tisu dan hand sanitizer untuk pelanggan dan/atau tanpa sentuhan langsung di area mencuci.
5. Mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli untuk pelanggan.
6. Menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non-sekali pakai dengan sabun yang efektif.
7. Memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis untuk mengurangi kontak langsung.
8. Menandai jarak aman dengan garis antrian.
9. Melakukan kegiatan disinfektan secara berkala di tempat umum.

Sanksi Administratif

Pasal 17

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol Kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan menjaga jarak pada tempat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan WaliKota ini dikenakan sanksi administratif sebagai berupa:

- a. Teguran Lisan; dan/atau
- b. Teguran Tertulis

Pasal 18

Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan ditempat/lokasi dalam tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrative berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional

Pasal 19

Setiap orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan pedoman tatanan perilaku hidup baru pada transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan sanksi administrative berupa:

- a. Teguran tertulis; dan/atau
- b. Teguran lisan;

Pasal 20

Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian dan TNI kecuali untuk sanksi pencabutan izin usaha dan/ atau izin operasional dilakukan oleh DPMPTSP.

Pasal 21

Pelaksanaan Pemberian sanksi administratif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pasal diatas terlihat bahwa Restoran, Café, atau Rumah Makan dan yang sejenis wajib mematuhi protol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari hasil observasi penulis di Kota Pekanbaru masih banyak terlihat pelanggaran protokol kesehatan oleh pemilik Café/ Rumah Makan maupun pengunjung yang datang. Adapun data Café/ Rumah Makan yang terindikasi melanggar protokol kesehatan, yakni:

Tabel I.2 Data Café / Rumah Makan yang melanggar prtokol kesehatan

NO.	TEMPAT	LOKASI
1	Tugu Bundaran Keris	Jalan Diponegoro
2	Wareh Kupie	Jalan Arifin Ahmad
3	Food Court	Jalan Arifin Ahmad
4	Dhapu Koffie	Jalan Jend Sudirman dan Jalan Ronggowarsito

Sumber: Observasi Penulis, 2021

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berada di Tugu Bundaran Keris karena berdasarkan dari observasi yang penulis lakukan pusat kuliner tersebut sangat ramai dan tidak menjaga protokol kesehatan. Tugu Bundaran Keris menjadi tempat favorit masyarakat pekanbaru dari kalangan remaja maupun kalangan orang dewasa. Tempat pusat kuliner yang ada ditengah Kota Pekanbaru ini sudah menjadi langganan keramaian setiap malamnya. Adapun tempat-tempat lainnya ini salah satu yang paling ramai dan sering dikunjungi masyarakat. Tugu Bundaran Keris ini dulu nya tempat orang berjualan yang tidak begitu ramai tetapi sekarang para pedagang penjual makanan menjajah hasil makanannya kepada masyarakat Pekanbaru. Yang berjualan sekarang bertambah kapasitas nya oleh demikian masyarakat pun bertambah yang berdatang kesana yang ingin berwisata kuliner atau sekadar nongkrong bersama teman maupun keluarga.

Oleh karena itu pusat kuliner Tugu Bundaran Keris ini pada saat Virus Corona sudah menghampiri Indonesia maupun sudah sampai ke Kota Pekanbaru masih ramai dikunjungi oleh masyarakat sedangkan dimana pemerintah selalu

melakukan atau menyebarkan informasi seluas-luasnya agar mencegah penyebaran Virus Corona dan mentaati protokol kesehatan untuk selalu dirumah saja dan misalkan ada keperluan diluar harus menggunakan masker atau alat APD lainnya. Wali Kota Pekanbaru pun akhir-akhir 2020 kemarin sudah menutupi tempat ini karena lain hal yaitu kapasitas pengunjung sangat melampaui batas maksimal. Dan pemerintah Kota Pekanbaru pun sudah menerapkan yang namanya PSBB. Relokasi yang dilakukan Wali Kota Pekanbaru sudah diganti sebagai alat alternatif untuk mengurangi kapasitas pengunjung yang datang ke Tugu Bundaran Keris agar pindah ke tempat yang sudah ditetapkan dan diberikan oleh Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wali Kota Pekanbaru adalah ada dua kategori penertiban yang bisa dilakukan bagi pedagang di Tugu Bundaran Keris yaitu Pertama, pusat kuliner itu aslinya illegal dan Kedua, Peraturan Wali Kota tentang New Normal dapat diterapkan jika protokol kesehatan dilanggar.

Hanya selang beberapa bulan tempat ini ditutup peneliti melihat nyata pada objek lokasi penelitian di Tugu Bundaran Keris ini telah kembali dibuka dan ramai oleh pengunjung. Sampai saat ini simpang siur perizinannya yang dimana tempat yang awalnya ditutup sudah dibuka kembali sementara wabah virus masih saja berada disetiap lingkungan masyarakat. Peneliti mengambil saran dan sampel bahwa Pusat Kuliner yang ada di Kota Pekanbaru ini sangat rawan terkena Virus Corona karena pedagang dan masyarakat sangat minim menggunakan alat APD seperti masker dan lain lain yang tidak menjaga protokol kesehatan.

Dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 30 persen yaitu 115 miliar. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan anggaran ini pada 15 Oktober 2020. (Pekanbaru.go.id, 2020).

Anggaran tersebut digunakan dalam beberapa kegiatan untuk penanganan Covid-19. Seperti untuk pengadaan alat kesehatan, bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak, Satuan tugas (Satgas) yang melakukan kegiatan di lapangan, dan fasilitas untuk pengendalian pandemi Covid-19.

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Pekanbaru terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah percepatan pengadaan laboratorium biomolekuler di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru. Dimana ditargetkan pekan depan sudah dapat beroperasi dan mulai melakukan pemeriksaan swab warga Pekanbaru.

Dinas-dinas yang terkait dalam upaya pencegahan Virus Corona (Covid-19) di Kota Pekanbaru yakni:

Satpol PP, yaitu berperan dalam bentuk informasi tentang protokol kesehatan dalam pencegahan virus corona untuk diberikan kepada masyarakat agar dilakukan dan diterapkannya sistem kesehatan tersebut. Dalam hal ini tentunya Dinas Kesehatan berperan sangat penting agar masyarakat peduli terhadap diri sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menumukan fenomenanya, ialah:

1. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengawasi tempat makan/café yang melanggar protol kesehatan.
2. Masih kurang tegasnya sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 104 berupa teguran lisan, tertulis serta pencabutan izin usaha bagi yang melanggar protokol kesehatan.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan pencegahan penyebaran Virus Corona

Berdasarkan fenemona yang ada di atas makan peneliti tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (COVID) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (COVID) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (COVID) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mencegah Virus Corona.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, sebagai sumbangan hasil penelitian dan sumbangan bagi pembangunan ilmu terutama ilmu pemerintah.
- b. Secara Akademik, sebagai penerapan ilmu pengetahuan tentang ilmu pemerintahan yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan serta sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama.
- c. Secara Praktis, bahan masukan untuk Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai pencegahan penyebaran Virus Corona.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi menurut (Syafiie 2007:8) pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah yang keduanya ada hubungan.
- a. Setelah di tambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
- b. Setelah di tambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Nawawi (2013:17) secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern, disamping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya.

Menurut (Woodrow Wilson dalam Syafiie dan Andi Azikin. 2008:9), pemerintahan dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian

kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata.

Menurut Boediningsih (2010:1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran Montesquieu dalam *trias politica* meliputi tiga kekuasaan: 1) Pembentukan undang-undang; 2) Pelaksanaan; 3) Peradilan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, peradilan dan kepolisian.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2002:74-75) bahwa konsep pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Badan Publik, yaitu badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh *rute providing* suatu jasa atau layanan melalui otoritas atau privasi.
2. Pemerintahan dalam arti terluas, adalah semua lembaga negara seperti yang diatur dalam UUD (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintahan dalam arti luas, adalah sebuah lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah UUD 1945: kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada Presiden dilimpahkan “*concentration of power and responsibility*”.
4. Pemerintah memegang arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.

5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan yang bukan dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.
6. Pemerintah dalam arti pelayanan, diambil dari konsep *civil servant*. Disini pemerintah dianggap sebagai sebuah warung (toko) dan Pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam konsep Pemerintahan Pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintahan daerah.
8. Pemerintah dalam konsep Pemerintahan Daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintahan dalam konsep Pemerintahan Wilayah, pemerintahan dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, contohnya Indonesia dibawah UU 5/74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kekuasaan (urusan) pusat di daerah di kelola oleh pemerintah wilayah.
10. Pemerintah dalam konsep Pemerintahan Dalam Negeri, konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda.

11. Pemerintahan dalam konteks Ilmu Pemerintahan adalah semua lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empiric memproses jasa publik dan layanan *civil*.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (dalam Syafiie, 2011:8) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Musanef (1985:11) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.

Menurut Syafiie (2011:23) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Azizy (2007:11) Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilan adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman rakyat.

Supriyanto (2009:26) mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara.

Ilmu pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintah umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada (Musaneef, 1997:15).

3. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Inu Kencana Syafie, 2005:21-22).

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan

secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara verikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan (Juanda, 2008 : 37).

Riawan (2009:197) Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengakibatkan pula terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah.

W.S Sayre (1960). Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

David Apter (1977) ialah satuan anggota yang paling umum yg memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakup dan monopolo praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Menurut Suganda (1992:87) urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri yaitu terutama dinas-dinas daerah.

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi
(Siswanto Sunarno, 2005 : 5):

- a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pemerintahan desa.

4. Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24).

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi administrasi publik yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energi atau sistem penggerak dan kendali atau dimensi manajemen (Keban, 2008:57).

Kebijakan publik menempati posisi yang vital dan penyelenggaraan negara, karena kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan

pemerintah dalam mengatur kehidupan bernegara. Bahkan Riant Nugroho menempatkan kebijakan publik kedalam salah satu komponen utama dalam sebuah negara. Menurut Nugroho, negara adalah sebuah identitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal empat komponen utama. Pertama, komponen lembaga negara, yaitu lembaga pemerintah (eksekutif), lembaga perundangan (legislatif), dan lembaga peradilan (yudikatif). Kedua, komponen rakyat sebagai warga negara (citizen). Ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Keempat, komponen kebijakan publik (Nugroho, 2011:17-18).

5. Konsep Implementasi

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabtier (dalam Wahab 2004:65) implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Implementasi menurut Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148) adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan. Istilah implementasi menunjukan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan yang dilakukan oleh para aparatur negara untuk membuat program berjalan.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) mendefinisikan implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan public yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10) implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2016) dalam teori implementasi kebijakan terdapat enam variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sisio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

c. Hubungan Antar Organisasi

Merupakan organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini dikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat di pengaruhi oleh hubungan yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

e. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

f. Komunikasi

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Menurut Nugroho (2014:667) implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk-bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi menyangkut 3 hal yaitu: (1) Adanya tujuan dan sasaran kebijakan; (2) Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) Adanya hasil kegiatan.

Menurut George Edward III (1980) teori implementasi kebijakan terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat

kebijakan (*Policy Makers*) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementers*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksana kebijakan, agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*), dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga pada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah di pahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang dengan adanya sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial atau sarana prasarana. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari implementor akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Menurut Edward dalam Widodo (2010:104), disposisi adalah suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh.

Sikap dari implementor akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek organisasi meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

6. Konsep Implementasi Pemerintahan

Implementasi kebijakan menurut Eugene Bardach dalam Leo Agustini adalah cukup membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan- 16 slogan yang kedengarannya mengenakan bagi

telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien (Agustino, 2016:138).

Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino adalah pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Agustino, 2016:139).

Implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn dalam Leo Agustino adalah tindakan-tindakan yang baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan kebijakan (Agustino, 2016:139).

Dari tiga definisi diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan banyakangkut pada tiga hal yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menyelenggarakan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang di inginkan. Pada sisi lain implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat di pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome) (Winarno, 2014:144).

7. Konsep Virus Corona (Covid-19)

Menurut WHO (World Health Organization) (2020), Menyatakan virus corona adalah keluarga virus besar yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu hingga bisa penyakit yang lebih parah. Gejala yang ditimbulkan paling umum adalah demam, kelelahan dan batuk kering. Beberapa pasien biasanya mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Virus corona ini pun menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh orang lain.

Menurut Richard Sutejo (2020), virus corona ialah merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernapasan. Tetapi strain covid-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetic dan kemungkinan transmisi inter-spesies.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Tentang Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris).

1	2	3	4	5	6
No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Jihan Kirana	Analisis dampak Covid-19 pada masyarakat Sumatera Utara	2020	- Membahas mengenai pengaruh Covid-19 yang terjadi di tengah-tengah masyarakat - Menggunakan metode penelitian kualitatif	Pada penelitian ini lebih membahas mengenai persoalan dampaknya Covid-19 di Sumatera Utara
2	Ni Wayan Ardiarani Utami	Gerakan 1000 masker melawan	2020	- Meneliti tentang pencegahan	yang menjadi fokus penelitian ini

		corona: pembagian di kecamatan di Denpasar Utara		dan pengendalian virus corona untuk masyarakat -	adalah gerakan yang dilakukan oleh Kepala Adat dalam pembagian masker untuk masyarakat di Denpasar Utara
3	Diah Handayani,dk k	Penyakit Virus Corona yang menular.	2020	Meneliti tentang covid-19 yang virus sangat membahayakan hingga bisa menular ke semua organ tubuh manusia.	Penelitian ini lebih berfokus kepada infeksi,kasus, dan pasien yang mengalami corona.
4	Ralang Hartati	Bersama melawan Virus Covid-19 di Indonesia	2020	Membahas tentang kepedulian dalam pencegahan virus corona untuk masyarakat	- Menggunak an metode penelitian kuantitatif. - Studi kasus di Kota Jakarta.
5	Adityo Susilo	Corona Disease 2019	2020	Membahas tentang langkah-	- Lebih menjelaska n mengenai

		Penyakit dalam di Indonesia		langkah cara pencegahan virus corona.	tentang dampak kalau penyakit ini terjadi kepada anak-anak 15 tahun kebawah. - Studi kasus di Kota Bandung.
--	--	-----------------------------	--	---------------------------------------	--

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2021

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Tugu Bundaran Keris).



D. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penafsiran yang akan menyamakan pemikiran dalam analisa dari penelitian ini. Penelitian mengoperasikan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah ditemukan sebelumnya oleh peneliti. Penggunaan konse ini diharapkan dapat menyederhanakan

pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya. Adapun konsep operasional tersebut antara lain:

1. Pemerintahan adalah suatu proses atau kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan yang ada.
2. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
3. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status, yang setiap orang mempunyai sejumlah status yang diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status yang dimilikinya. Dalam arti status dan peran dua aspek dari gejala yang sama.
4. Pemerintah Daerah adalah merupakan salah satu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

6. Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang.
7. Virus Corona (COVID-19) adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
8. Komunikasi adalah pentingnya setiap aparat pemerintah dan masyarakat selalu menjaga komunikasi yang baik agar tujuan cepat tercapai.
9. Sumber Daya adalah melakukan setiap proses dan perubahan dari apa yang dipunya seperti sumber daya yang melimpah bisa membantu menanggulangi serta pengawasan dari penyakit menular ini Covid-19
10. Disposisi adalah seperti tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Maka dibutuhkan seorang pemimpin dalam mencegah penanganan Covid-19 ini. Karena dari masyarakatlah pemimpin itu dipilih serta bertanggung jawab bersama untuk mencegah Covid-19.
11. Struktur Birokrasi adalah dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Tugu Bundaran Keris).

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut George C. Edward III (2005) Implementasi Kebijakan yaitu setelah kebijakan di transformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan	Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mencegah penyebaran Virus Corona (studi pusat kuliner tugu bundaran keris)	Komunikasi	a. Mengadakan sosialisasi terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran Virus Corona b. Memberikan informasi kepada pengunjung dan pedagang.
		Sumber Daya	a. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan b. Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam mencegah

			penyebaran Virus Corona
		Disposisi	a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan b. Respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan
		Struktur Birokrasi	a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan b. Memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan kebijakan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisis data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, dengan melakukan pendekatan kualitatif mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu (Ruslan, 2010:215).

Penelitian Kualitatif Deskriptif berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa sumber yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian dianalisis secara deskriptif sesuai dengan materi permasalahan serta berupaya melakukan pemahaman mendalam, serta interpretasi yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Jane mengungkapkan ada beberapa keuntungan dalam penggunaan penelitian Kualitatif. Keuntungan tersebut dapat dirasakan ketika melihat realitas sosial yang merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Moleong, 2005:6).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tugu Bundaran Keris Jalan Diponegoro. Alasan peneliti melakukan penelitian di Tugu Bundaran Keris karena pusat keramaian yang ada di Kota Pekanbaru berada di tempat ini apalagi dimasa pandemi masyarakat selalu berdatang kesana untuk berwisata kuliner atau sekedar nongkrong yang seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru menghimbau agar menjauhkan dan menjaga diri dari pusat keramaian agar terhindar dari Virus Corona. Dan sementara itu tempat sudah pernah ditutup oleh Wali Kota Pekanbaru karena tidak memiliki perizinan atau illegal. Kenyataannya peneliti melihat selang beberapa bulan dan sampai sekarang tempat itu sudah dibuka lagi.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini terdapat dua informan, yaitu:

1. Key Informan (Informan Kunci) menurut Suwardi Endaswara (2006:119) yaitu seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap objek atau permasalahan yang diteliti. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru.
2. Informan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan berpengalaman lebih mengenai objek penelitian. Menurut Meleong (2006:132) informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti.

Tabel III.1 Daftar Nama Key Informan dan Informan

NO.	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru	Key Informan
2	Pelaku usaha	Informan
3	Pelaku usaha	Informan
4	Pengunjung	Informan
5	Pengunjung	Informan

Sumber: *Data Olahan Penulis 2021*

D. Teknik Penarikan Informan

Informan merupakan orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan dapat menjelaskan secara rinci terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penarikan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut sugiyono (2012:54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu.

E. Jenis dan Sumber Data

Data menurut Bungin (2009:129) adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Data merupakan suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode, dan lain-lain.

1. Data primer

Menurut Iskandar (2008:252), Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data

Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan melakukan observasi ke

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253), Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki hubungan dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa data yang telah tersedia di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru dan juga dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan hal tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan. Observasi dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam memperoleh data dengan cara terjun langsung mengamati kejadian atau peristiwa di Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris..
2. Wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan serangkaian Tanya jawab secara langsung kepada

narasumber yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas. Dengan penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan.

3. Dokumentasi, pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Singarimbun, 1998:15). Dokumentasi dijadikan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa dokumen, peraturan yang berlaku, landasan hukum dan lain-lain yang dapat dijadikan bukti dalam penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta lapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Untuk mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisi sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya dengan yang lain didalam aspek yang diteliti.

H. Jadwal Waktu Kegiatan

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Mingguk-																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Perbaikan UP																				
4	Tujuan Pembimbing																				
5	Analisis Data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Perbaikan Bab ke Bab																				
8	Acc skripsi																				
9	Ujian skripsi																				
10	Perbaikan																				
11	Perbanyakan/pandangan																				

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke 18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru. Dan pada selanjutnya, tanggal 23 Juni diperingati sebagai hari jadi kota Pekanbaru.

Berdasarkan *Belsuit Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi Ibukota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai seorang Gubernur militer yang disebut Gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan pada tanggal 17 Mei 1946 No.103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang dinamai *Hamite atau Kotapraja*. Kemudian sejak tanggal 9 Agustus 1957 berlaku Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru termasuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959.

2. Keadaan Geografis

Secara geografis kota Pekanbaru berada pada jalur lintas Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. Dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sedangkan di bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian sekitar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini beriklim tropis dengan suhu udara maksimum sekitar 34°C hingga 35°C dan suhu minimum antara 20°C hingga 23°C.

Sebelum tahun 1960 luas kota Pekanbaru hanya 16km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km²² dengan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya, pada tahun 1965 menjadi 6 Kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003, Kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12 Kecamatan.

3. Kependudukan

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang. Pesatnya pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru, menjadi pendorong cepatnya pertumbuhan penduduk di Pekanbaru.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Selain itu, etnis yang juga memiliki jumlah yang cukup besar yaitu Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibukota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki pengaruh besar dalam menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Jawa awalnya banyak yang didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti diluar kota.

Berkembangnya industri di Provinsi Riau yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan. Hal ini menjadi salah

satu faktor banyaknya masyarakat Batak yang datang ke Provinsi Riau. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan dengan kelompok etnik lain yang ada di kota Pekanbaru. Pasca Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharudin Nasution menjadi penguasa perang riau daratan.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat kota Pekanbaru, sedangkan pemeluk agama Kristen, Budha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota Pekanbaru tetapi tidak dominan.

4. Pemerintahan

a. Orde Baru

Pada sistem pemerintahan Orde Baru membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Pada 1 Juni 1968 Raja Rusli B.A diangkat sebagai Walikota Pekanbaru sampai dengan tanggal 10 Desember 1970. Kemudian digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan periode pemerintahan kota. Pada tanggal 5 Juli 1981 Ibrahim Arsyad S.H terpilih sebagai walikota Pekanbaru, kemudian pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, Berikutnya pada 22 Juli 1991 terpilih H.Oesman Effendi Apan, S.H sebagai walikota selanjutnya.

b. Orde Daerah

Pada pemerintahan otonomi daerah yang lebih luas, menimbulkan kesenangan bagi masyarakat kota Pekanbaru, terutama yang berkaitan dengan politik dan ekonomi. Pada tahun 2001, Drs. H. Herman Abdullah, M.M terpilih sebagai walikota Pekanbaru selama dua periode. Beliau termasuk salah satu walikota yang berhasil dalam menerapkan sistem birokrasi dalam pemerintahan kota Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

5. Perekonomian

Perkembangan perekonomian kota Pekanbaru sangat di pengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik kertas, dan perkebunan kelapa sawit. Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan di kota Pekanbaru, memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Pekanbaru. Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan pertumbuhan pertahun sebesar 3,82% dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronik, industri pertanian dan kehutanan.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada awalnya, wisata kuliner yang ada di kota Pekanbaru sangat banyak bukan hanya di satu tempat yaitu di Tugu Bundaran Keris ini saja tapi banyak tempat-tempat wisata kuliner lainnya akan tetapi penulis tertarik dan melihat Tugu Bundaran Keris inilah yang sangat populer dikawasan kota

Pekanbaru dan sangat diminati masyarakat Pekanbaru sendiri. Tugu Bundaran Keris berdiri diperkirakan sejak awal-awal 2016 yang masih banyak belum masyarakat Pekanbaru mengetahuinya dalam arti belum populer seperti sekarang. Di awal 2017 barulah sedikit demi sedikit masyarakat banyak yang berkunjung kesana untuk berburu kuliner. Dengan awalnya sten-sten yang masih sedikit atau lapak orang penjual yang belum begitu banyak sekarang sudah diperkirakan lebih kurang 88 pedagang yang berjualan disana. Tugu Bundaran Keris ini letaknya ditengah kota Pekanbaru yang berada di jalan Diponegoro lebih tepatnya di tengah-tengah pusat kota Pekanbaru. Dengan tempat yang berada ditengah-tengah kota Pekanbaru Tugu Bundaran Keris ini tidak sulit untuk dijamah oleh masyarakat Pekanbaru karena dengan lain hal tempatnya sangatlah strategis. Lain hal juga dulu masyarakat Pekanbaru banyak yang sudah mengetahui pusat jajanan yang tidak jauh dari Tugu Bundaran Keris yaitu WR.Supratman. WR.Supratman itu sendiri masih sering juga dijamah oleh masyarakat Pekanbaru dalam arti masyarakat masih juga ada berkunjung kesana dan yang tidak melupakan dengan pusat jajanan yang sudah lama itu.

Oleh karena itu balik lagi karena proses dan waktu yang semakin berjalan Tugu Bundaran Keris menjadi tempat yang sangat populer dan pusat kuliner yang teramai setiap malamnya yang dikunjungi dalam kalangan manapun baik remaja ataupun orang dewasa. Untuk memenuhi kepuasan hati mereka tempat ini disediakan fasilitas seperti meja, bangku, hiasan lampu dan fasilitas seperti parkir untuk meletak kendaraan

pengunjung yang datang ke Tugu Bundaran Keris dan selain itu dihari-hari tentu Tugu Bundaran Keris ini mengadakan live music untuk memanjakan masyarakat Pekanbaru serta menarik masyarakat agar berbondong-bondong datang kesana. Tempat ini jam bukanya ialah 18.30 malam tetapi lain hal dengan penjual yang sudah berada disana sekitaran 17.00 sore karena mereka terlebih dahulu harus menyiapkan alat-alat dagang mereka. Oleh karena itu pusat kuliner Tugu Bundaran Keris ini ramai dikunjungi masyarakat tepatnya pada malam hari dan dihari weekend atau libur kerja.

VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKAMBARU

VISI:

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum.

Dalam penyertaan Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- 1) Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram
- 2) Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin
- 3) Tata hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

MISI:

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat di dalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini implementasi kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam mencegah penyebaran Virus Corona terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut.

1. Jenis kelamin informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variable penelitian, khususnya dalam mengetahui mengenai implementasi kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam mencegah penyebaran Virus Corona. Distribusi informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel V.1 Tabel Jenis Kelamin Informan Penelitian

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	2	20%
		6	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dengan presentase 80% dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan presentase 20%.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis Pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. Informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V.2 Tabel Tingkat Pendidikan Informan Penelitian

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	-	-
4	SMA	3	50%
5	D1-D3	-	-
6	D4-S1	3	50%
7	S2	-	-
8	S3	-	-
	Jumlah	6	100%

3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktivitas dalam hidupnya, dikarekan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, serta mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel berikut:

Tabel V.3 Tabel Tingkat Usia Informan

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase
1	21-30	3	50%
2	31-40	1	20%
3	41-50	2	30%
		6	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 3 orang, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 1 orang, dan yang berumur 41-50 sebanyak 2 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa

berdasarkan gambaran tersebut rata-rata informan dalam penelitian ini relative nya sudah dewasa.

B. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian berdasarkan wawancara, pengamatan dilapangan serta dokumentasi baik pribadi ataupun dokumentasi Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris. Peneliti memperoleh berbagai macam informasi dan analisis tersendiri tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris).

Virus Corona adalah keluarga virus besar yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, Virus Corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu hingga bisa penyakit yang lebih parah. Gejala yang ditimbulkan paling umum adalah demam, kelelahan dan batuk kering. Virus Corona dapat tersebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut Ketika seseorang batuk dan menghembuskan nafas.

Dalam bagian ini penulis akan menyampaikan analisa bagaimana tanggapan dari informan dalam mencegah penyebaran Virus Corona di pusat kuliner tugu bundaran keris.

Usaha pencegahan penyebaran Virus Corona mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Pencegahan ini dilakukan untuk menghambat penyebaran Virus Corona terutama di pusat kuliner tugu bundaran keris.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy Makers*) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementers*) (Widodo, 2011:97).

Informasi juga perlu di sampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksana kebijakan, agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dimaksud dalam penelitian ini berupa sosialisasi atau penyampain informasi dan pemahaman mengenai pencegahan penyebaran Virus Corona. Pada dasarnya pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran Virus Corona dilakukan untuk menghambat tersebarnya Virus Corona yang sedang marak dan sangat berbahaya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu Bapak Fakhruddin SP, Hari Jumat 12 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Kami telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung yang ada di Bundaran Keris seperti menyampaikan hal apa saja yang harus dilakukan agar Virus Corona tidak semakin tersebar. Ya kami pun juga menghimbau pedagang dan pengunjung untuk mematuhi prokes seperti mencuci tangan sebelum memasuki lokasi, memakai masker, tentunya menjaga jarak pasti, dan kepada pedagang kami wajibkan untuk tutup pukul 8 malam sedangkan untuk pengunjung kami hanya memberikan 50% dari

kapasitas. Selain memnyampaikan secara langsung kami juga memberikan himbauan dalam bentuk media cetak, media elektronik, media udara, dan spanduk-spanduk pasang di jalan. Saya pasti taulah sedikit banyaknya pasti ada pedagang dan pengunjung yang masih suka melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tapi sebagai petugas kami sudah melakukan semaksimal mungkin karna itu tugas kami”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru terkait dengan indikator komunikasi tentang pencegahan penyebaran Virus Corona bahwa sosialisasi maupun himbauan dari berbagai media pun yang diberikan sudah maksimal, namun kesadaran dari masyarakat lah yang membuat pencegahan penyebaran Virus Corona tidak berjalan maksimal.

Salah satu sasaran dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona adalah pedagang di Bundaran Keris. Seperti wawancara dibawah ini bersama Bapak Kelvin Budian, hari Sabtu 13 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Ya memang ada razia-razia yang dilakukan oleh petugas, terus kami juga jam 8 malam dianjurkan untuk tutup, kalau lewat dari itu biasanya suka ditegur sama petugasnya. Sebenarnya aku dari pribadi merasakan keberatan kalau tutup di jam segitu bang soalnya masih banyak pengunjung yang duduk atau dating dijam segitu”

Hal yang sama diungkapkan oleh Kak Divia Bella, selaku pedagang di Bundaran Keris, beliau mengatakan bahwa:

“Waktu itu emang sempat ada sosialisasi tapi emang cuman sekali itu aja sih, seperti biasalah kita disuruh pakai masker, jaga jarak dan sempat beberapakali dibatasin makan ditempat, tapi ya gitu namanya kita pedagang curi-curi aja sih biar engga ketahuan”

Berdasarkan hasil wawancara beberapa pedagang dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pernah diadakan oleh petugas namun upaya pencegahan

berjalan tidak maksimal karena kurangnya disiplin pedagang dalam pencegahan Virus Corona.

Agar upaya pencegahan penyebaran Virus Corona berjalan dengan baik peran pengunjung diperlukan di dalamnya. Seperti wawancara dibawah ini bersama kak Yuliana Adiyana, hari Minggu 14 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Aku sebagai pengunjung tau kok kalau sosialisasi ada terus dimana-mana bahkan sampai PSBB dan PPKM disemua tempat restoran, pusat kuliner, coffee shop diadakan. Tapi ya gimana sesekali adalah aku dimana untuk curi-curi jam yang telah ditetapkan yang seharusnya jam 8 aku balek pulang nya jam 9 atau jam 10 baru pulang, tapi masih mematuhi prokes kok. Namanya anak muda pasti sih ada bandel-bandel nya dikit bang apalagi itu masih jam 8 malam sebenarnya itu waktu yang sebentar untuk nongkrong dan berwisata kuliner”

Hal yang sama diutarakan Bang Alecxander, selaku pengunjung juga yang sering berkunjung ke Bundaran Keris, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau disini gatau ya ada sosialisasi atau engga nya soalnya selama disini aku engga pernah kena razia ama naman aja sih. Kalau Adapun razia atau apapun itu kita ngikut ajasih bang. Aku palingan kesini sesudah magrib hanya untuk makan dan sehabis itu pulang bang. Untuk razia-razia aku cuman tau nya dari internet atau sosmed”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dari pengunjung di Bundaran Keris dapat disimpulkan bahwa ada sebagian pengunjung yang mengetahui tentang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas namun ada juga sebagian yang tidak mengetahui tentang adanya sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, dapat dinyatakan bahwa sosialisasi mengenai upaya pencegahan penyebaran

Virus Corona telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dengan melibatkan Satgas Covid. Namun ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang sosialisasi tersebut, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.

Menurut Hasibuan (2003), sumber daya merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana. Sumber daya manusia yaitu berupa kompetensi dari petugas dan masyarakat. Sedangkan sumber daya sarana prasarana berupa tersedianya fasilitas untuk masyarakat seperti, air yang disediakan oleh petugas untuk mencuci tangan sebelum memasuki Bundaran Keris. Tidak hanya peran petugas yang diperlukan dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona, tetapi kesadaran dari masyarakat juga sangat diperlukan.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Fakhruddin SP, Hari Jumat 12 November 2021, mengatakan bahwa:

“Kami selaku petugas sudah sangat mengupayakan hal-hal untuk mencegah penyebaran Virus Corona mulai dari sosialisasi, razia, bahkan swab ditempat serta mengangkut langsung masyarakat yang terindikasi positif Covid-19. Mungkin upaya kami terbatas karna jumlah petugas yang

turun ke lapangan dengan jumlah masyarakat yang ada dilapangan tidak seimbang. Tapi bagaimana pun kami pasti melakukan sebisa kami. Kami juga menyediakan fasilitas air untuk mencuci tangan, tapi kadang masi ada jugalah yang tidak mencuci tangannya. Malah kadang si pedagang dipakai untuk mencuci piring jadinya disalah gunakan gitu ya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kepada Bapak Fakhruddin SP terkait indikator sumber daya tentang pencegahan penyebaran Virus Corona bahwa para petugas sudah melakukan aktivitas turun kelapangan serta sosialisasi selalu diberikan kepada masyarakat. Namun jumlah petugas yang tidak seimbang dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung ke Bundaran Keris. Hal itu yang diungkapkan oleh Bapak Fakhruddin SP tetapi mereka selalu berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan tugasnya. Fasilitas berupa penyediaan air untuk mencuci tangan juga sudah disediakan oleh petugas. Dalam hal ini sumber daya manusia dan sarana prasarana sudah terpenuhi.

Dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona, peran pedagang yang ada di Bundaran Keris juga diperlukan. Berikut hasil wawancara Bapak Kelvin Budian, hari Sabtu 13 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya setiap hari ada petugas yang jaga dan keliling disini, biasanya nantik orang-orang yang gapakai masker dan duduknya terlalu ramai yang ga sesuai sama prokes biasanya bang nantik kena teguran lisan”

Hal serupa juga disampaikan oleh Kak Divia Bella selaku pedagang disana, hari Sabtu 13 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Kami disediakan dari pemerintah sarana untuk mencuci tangan agar sebelum memasuki area ini kami dan pengunjung diwajibkan mencuci tangan. Selain itu ada sih bang handsanitizer yang disediakan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang dapat disimpulkan bahwa pedagang menerima dengan baik masukan dan tindakan yang dilakukan oleh petugas terkait upaya pencegahan penyebaran Virus Corona. Selain itu masyarakat menerima dan menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah.

Selain pedagang, peran pengunjung juga dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona, hasil wawancara bersama Kak Yuliana Adiyana, hari Minggu 14 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Hal yang saya tau ada petugas yang datang ke tempat-tempat nongkrong untuk ngasih himbauan kalau tempat itu udah terlalu ramai. Tapi waktu itu kita cuman dikasihtau aja ga di gimana-mana in bang”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pengunjung yaitu Bang Alecxander, hari Minggu 14 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk fasilitas bang, ya biasalah kaya ditempat-tempat lainnya disediakan handsanitizer, tapi ya kadang aku pake kadang engga juga bang soalnya udah mulai bosan juga”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung, dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat yang merasa bahwa mematuhi protokol kesehatan itu penting. Padahal semua setiap aturan yang ditetapkan bertujuan untuk kesehatan seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, bahwasanya petugas telah memenuhi indikator sumber daya dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona. Baik itu sumber daya manusia berupa sosialisasi dan razia yang dilaksanakan oleh petugas, maupun sarana

prasana media cuci tangan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti tanggung jawab, jujur, dan komitmen yang tinggi.

Menurut Edward dalam Widodo (2010:104), disposisi adalah suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh.

Salah satu kunci keberhasilan dari upaya pencegahan penyebaran Virus Corona adalah pemahaman dari petugas mengenai hal-hal yang dapat pencegahan penyebaran Virus Corona. Disposisi yang dimaksud dalam hal ini yaitu berupa sikap maupun pemahaman dari petugas sekaligus masyarakat sebagai pelaksana dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona. Berikut wawancara bersama Bapak Fakhrudin SP, hari Jumat 12 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Seluruh petugas diharuskan mengerti untuk itu kami memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada petugas dalam pencegahan penyebaran Virus Corona ini. Kami selaku petugas tentunya mengupayakan seoptimal mungkin agar masyarakat dapat menerima dengan baik hal-hal yang kami sampaikan, namun bagi sebagian masyarakat tidak dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan kami melakukan teguran ringan terlebih dahulu dan kalau seandainya tidak dihiraukan akan ada penindakan tegas dari kami”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya para petugas dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona sudah maksimal. Namun sanksi yang diterapkan masih kurang tegas.

Pedagang merupakan salah satu yang berperan dalam upaya pencegahna penyebaran Virus Corona. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Kelvin Budian dan Kak Divia Bella, selaku pedagang. Hari Sabtu 13 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Semenjak adanya pembatasan jam buka ini omset perhari menurun, yang biasanya dapat 500an sekarang paling banyak 200an itupun susah dapatnya. Karena masyarakat juga sering dirumah dan masyarakat pasti tau tentang razia-razia yang ada jadi takut buat keluar rumah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat khususnya pedagang merasakan dampak yang signifikan dengan adanya peraturan mengenai pencegahan penyebaran Virus Corona.

Respon dari masyarakat terhadap upaya pencegahan penyebaran Virus Corona sangat berpengaruh. Seperti yang diungkapkan Kak Yuliana Adiyana, selaku pengunjung. hari Minggu 14 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya pribadi bang, saya percaya upaya apapun yang dilakukan oleh petugas tujuan pasti baik untuk kita semua. Apalagi kan bang Virus Corona ini udah mendunia pengen nya cepat membaik aja supaya bisa normal lagi kitanya”.

Selanjutnya, wawancara bersama pengunjung lainnya oleh Bang Alecxander, hari Minggu 14 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini saya memang belum sepenuhnya mematuhi anjuran-anjuran yang diterapkan oleh pemerintah atau petugas. Kalau untuk memakai

masker ya saya makai bang, tapi untuk tidak berkumpul ditempat yang ramai seperti disini saya belum mematuhi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengunjung yang ada di Bundaran Keris bahwa ada sebagian masyarakat yang mematuhi aturan pemerintah dalam pencegahan penyebaran Virus Corona, namun juga ada masyarakat yang kurang kesadaran sehingga belum sepenuhnya mematuhi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, bahwasan nya petugas sudah berupaya dalam pencegahan penyebaran Virus Corona. Mulai dari mengadakan sosialisasi, melakukan razia-razia hingga memberikan sanksi ringan kepada masyarakat yang melanggar aturan. Selain itu petugas juga masih terus memberikan teguran kepada masyarakat yang sesekali masih belum mematuhi protokol kesehatan. Namun, lagi-lagi kurangnya kesadaran masyarakat yang menghambat upaya pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward struktur birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan berdasarkan aspek pada struktur organisasi yakni *Standard Operating Prosedur* (SOP).

Struktur Birokrasi adalah susunan kata kerja suatu organisasi atau instansi yang berpegang teguh pada peraturan. Dalam hal ini struktur birokrasi yang dimaksud yaitu berupa tugas dan peran petugas dalam proses upaya pencegahan penyebaran Virus Corona.

Berikut penjelasan dari Bapak Fakhrudin SP, selaku Kabid Penegakan Perundang Undangan Daerah. Hari Jumat 12 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Tentunya, saya menugaskan seluruh petugas untuk turun ke lapangan. Mulai dari razia, penjagaan, semua ada tugasnya masing-masing. Dan itu juga ada shiftnya. Dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Virus Corona, tidak ada hambatan yang serius kita temui, seperti yang saya sampaikan tadi, balik lagi lebih kepada kesadaran masyarakatnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kepada Kabid Penegakan Perundan Undangan Daerah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari upaya pencegahan penyebaran Virus Corona sudah berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, bahwasannya proses dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona sudah berjalan optimal. Dalam struktur birokrasi di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru sudah tertera pembagian tugas untuk masing-masing staff, dalam hal ini seluruh petugas ikut berperan dalam proses upaya pencegahan penyebaran Virus Corona.

Kesimpulan dari keseluruhan indikator yang ada dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris). Dapat dikatakan kurang maksimal atau kurang baik, dikarenakan terdapat beberapa indikator dalam upaya pelaksanaan pencegahan penyebaran Virus Corona yang pertama dalam indikator komunikasi, terkait sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh

dan hanya ke beberapa tempat dominan sering dikunjungi masyarakat dan sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara berulang. Hal ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat kurang disiplin. Kemudian pada indikator sumber daya, terkait dengan fasilitas yang telah disediakan yaitu berupa sarana cuci tangan akan tetapi sebagian masyarakat tidak menggunakan sarana cuci tangan tersebut sebelum memasuki area. Dan pada indikator disposisi, terkait dengan kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi aturan yang ada, seharusnya ada sanksi tegas yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan terkait pencegahan penyebaran Virus Corona. Dalam hal ini petugas sudah berupaya semaksimal mungkin dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona, tapi masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari bahwa mematuhi peraturan guna untuk mencegah penyebaran Virus Corona itu sangat penting.

C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris)

Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris) menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya, adapun beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Tidak maksimalnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas terkait pencegahan penyebaran Virus Corona, yang mana sosialisasi hanya dilakukan ke beberapa tempat yang dominan dikunjungi oleh masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Fakhruddin SP, hari Jumat 12 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Kami sudah melaksanakan sosialisasi ke beberapa tempat yang dominan dikunjungi oleh masyarakat. Karena kami mengutamakan tempat-tempat yang mudah untuk dijangkau dan terlihat. karena seperti Bundaran Keris yang tempat di pusat kota dan itu memang sering dikunjungi oleh masyarakat, jadi kita mengutamakan tempat-tempat seperti itu”.

2. Dengan berbedanya bentuk kesadaran dari masing-masing masyarakat terkait upaya pencegahan penyebaran Virus Corona, mengakibatkan sebagian dari masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Fakhruddin SP, selaku Kabid Penegakan Perundang Undangan Daerah, hari Jumat 12 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Kami selaku petugas sudah mengupayakan semaksimal mungkin dalam pencegahan penyebaran Virus Corona. Namun seperti yang telah saya sampaikan tadi bagaimanapun yang telah kami upayakan kesadaran masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam terwujudnya upaya pencegahan penyebaran Virus Corona. Karena saya juga tau kok sedikit banyaknya pasti ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan”.

3. Terkait dengan tidak adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar menjadi salah satu faktor upaya ini tidak berjalan optimal. Hal tersebut diungkapkan Bapak Fakhruddin, selaku Kabid Penegakan Perundang

Undangan Daerah. hari Jumat 12 November 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Saya akui tidak ada sanksi tegas yang kami berikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi atau melanggar aturan yang kami tetapkan. Karena berdasarkan aturan, awalan yang kami tindak itu berupa teguran lisan, kalau dengan teguran lisan tidak mengerti barulah kemudian kami memberikan teguran berupa sanksi”.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris) adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan penyebaran Virus Corona merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi tingginya angka yang terpapar Virus Corona.
2. Satpol PP Kota Pekanbaru merupakan salah satu yang turut melaksanakan upaya pencegahan penyebaran Virus Corona
3. Sosialisasi mengenai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona dilakukan dengan menggunakan media langsung atau tatap muka dan media masa. Media langsung seperti mendatangi tempat makan atau tempat nongkrong dan menyampaikan apa saja hal yang dianjurkan oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran Virus Corona. Sedangkan untuk media cetak, seperti koran, baliho dan spanduk. Untuk media elektronik seperti internet, radio, berita di tv dan lainnya.
4. Dalam proses pencegahan penyebaran Virus Corona selain petugas, masyarakat juga berperan didalamnya. Petugas yang berperan sebagai penertiban sedangkan masyarakat yang berperan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

5. Dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa sarana cuci tangan dan *hand sanitizer*. Dan bagi masyarakat yang tidak mengikuti anjuran protokol kesehatan yang telah ditetapkan akan diberikan teguran lisan.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan berdasarkan hasil dan pembahasan yaitu:

1. Disarankan kepada petugas dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi atau razia kepada masyarakat akan lebih baik jika melakukannya keseluruhan tempat yang dikunjungi oleh masyarakat. Baik itu di wilayah pusat kota maupun wilayah pinggiran Kota Pekanbaru. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan dalam mencegah penyebaran Virus Corona. Dan sosialisasi yang dilakukan seharusnya lebih rutin lagi.
2. Disarankan kepada petugas untuk memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar dan tidak mematuhi aturan mengenai pencegahan penyebaran Virus Corona. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga tidak mengulanginya Kembali.
3. Disarankan kepada masyarakat agar sedikit lebih peduli kepada lingkungan sekitar terkait kesadaran dalam pencegahan Virus Corona. Hal ini bertujuan agar upaya yang selama ini dilakukan dapat terwujud dan mengurangi resiko terpaparnya dari Virus Corona.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Jakarta.
- Azizy A. 2007. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.
- Boediningsih, Widyowati. 2010. *Kedudukan, Wewenang dan Tindakan Hukum Pemerintah*. Surabaya. Universitas Narotama Press.
- G.R. Terry. 2002. *Principle Of Management*. Pustaka Hidayah. Bandung.
- Handoko. 2003. *Pengantar Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Hoogerwerf. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Erlangga. Jakarta.
- Hasibuan. 2006. *Organisasi dan Peningkatan Prodktivitas*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Inu Kencana, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 87
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Alumni. Jakarta.
- Keban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. CV. Haji Mas Agung. Jakarta.
- Musanef. 1997. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Ndaraha, Taliziduhu. 2002. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rasyid. 2000. *Manajemen Pemerintah*. Pustaka. Yogyakarta.
- Riawan. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ruslan, Rosady. 2020. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Cetakan kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siagian. 2001. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Kerjasama, Koordinasi Standar Operating Sistem dan Fragmentasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Siswanto Suwarno. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sulaiman. 1998. *Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*. Munandar Terbitan. Yogyakarta.

Suganda. 1992. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

Surya Dinata. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. CV. Media Brilian. Tangerang.

Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Media Brilian. Tangerang.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pemerintahan Daerah*. PT. Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama.

Syafiie dan Andi Azikin. 2008. *Perbandingan Pemerintahan*. Refika Aditama. Bandung.

Winarno, Budi. 2014. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo. Jakarta.

JURNAL:

Adityo Susilo.2020. *Coronavirus Disease 2019*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 7(1): 45-67.

Diah Handayani,dkk.2020.. *Penyakit Virus Corona*. Jurnal Respir Indo. 40. 120-130

Edi Sumardi.2020 “PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)”. <https://www.jogloabang.com/kesehatan>. 1 April 2020.

Firdaus. 2020. *Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020*. <https://covid19.hukumonline.com>. Tanggal 9 juni 2020.

Jihan Kirana,dkk .2020. *Analisis dampak covid-19 pada masyarakat Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi PGSD. 1(1)

Laras Olivia,2021. *“Update pasien covid di Pekanbaru”*. <https://riauonline.go.id/> Tanggal 21 Februari 2021.

Mega Aulia,dkk. 2020 *“Pengobatan Covid-19 Ditanggung Pemerintah”* <https://www.academia.edu/42849540/> Tanggal 23 Oktober 2020.

Ni Wayan Ardiarani Utami,Kadek Risna Puspita Giri.2020. *Gerakan 1000 masker melawan corona: pembagian di kecamatan Denpasar utara*. Jurnal Lentera Widya. 7(2): 24-30

Raden Agung.2017. *“Partisipasi Masyarakat Untuk Melakukan Kegiatan Kesehatan dan Donor Darah Di Serang, Banten”*. Skripsi UINSUSKA: JAKARTA”.10(7). 17-62

Syafrida Ralang Hartati.2020. *Bersama melawan virus covid19 di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya syar-i. 7(6): 495-507

Yono S. 2020. *“Fungsi Dinas Kesehatan”*. <https://dinkes.slemankab.go.id/dinas-kesehatan/upt-poak>. Tanggal 24 juli 2020.

Yesaya R.2020. *“Pemko Serap 30 Persen Anggaran Covid”*. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-serap-30-persen-anggaran-covid>. Tanggal 15 Oktober 2020.